

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap warga Negara Indonesia berhak memiliki identitas kependudukan yang berupa NIK (Nomor Identitas Kependudukan) bersifat unik atau khas, tunggal melekat pada seseorang berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Nomor Identitas Kependudukan pada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan Nomor Identitas Kependudukan tersebut dapat diubah sampai orang yang bersangkutan meninggal dunia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pemerintah wajib memberikan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan.

NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi dengan ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap pada tahun 2011. NIK terdiri dari 16 digit, kode penyusunan NIK terdiri dari 6 (enam) digit pertama kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit setelahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hh-bb-tt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari “0001”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengolahan informasi administrasi kependudukan yang akan dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan dalam bentuk database akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kelurahan.

Nomor Identitas Kependudukan merupakan Identitas resmi bukti domisili penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah juga bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan public di Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan. Dengan melampirkan dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan yang menginput NIK dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polisi Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi yang berarti NIK adalah dasar untuk pelayanan publik ke depan.

Nomor Identitas Kependudukan merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan seumur hidup untuk warga negara Indonesia untuk warga asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang ditertibkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP oleh instansi pelaksana yang tempat domisili yang bersangkutan (UU RI Nomor 23 Tahun 2006: Pasal 16).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Undang No. 24 tahun 2013 pasal 39 mengamanatkan bahwa pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib mencantumkan NIK pada kolom khusus yang tersedia pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan. Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK serta NIK ditetapkan secara nasional oleh Menteri sebagai Pimpinan Instansi Pelaksana. Dengan pemberlakuan NIK kelak tolak ukur dalam pelayanan publik ialah NIK, karena posisi NIK itu sangat penting untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional. Tertib administrasi kependudukan yang diharapkan terwujud dengan sistem yang baru, sangat diperlukan mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat lebih mudah memenuhi hak-hak warga negara untuk kedepannya, NIK dapat diakses oleh semua instansi adminduk sehingga tidak dimungkinkan lagi satu warga memiliki dua identitas atau lebih ketunggalan NIK dijaga melalui sistem identifikasi biometrik, sidik jari, iris mata, dan wajah pada penerapan KTP Elektronik.

Permasalahan warga dengan memiliki dua identitas yang terjadi pada saat pemutakhiran data kependudukan pada tahun 2009-2010 dalam program penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) memberi pertanyaan serius kepada Kemendagri untuk bisa menyikapi persoalan tersebut karena akan terjadi kesalahan data yang mana komputer atau database menolak bahkan tidak dapat mengakses data yang dimaksud. Akibat dari penduduk yang memiliki dua identitas atau NIK ganda yaitu :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Tidak diakui oleh Negara identitasnya

Tidak mendapatkan pelayanan semestinya masyarakat yang tinggal di Indonesia, khususnya dalam pembuatan dokumen kependudukan agar tidak terjadi data yang ganda bahkan menginfeksi data yang lain.

b. Tidak dapat melakukan proses administrasi pelayanan publik seperti Pajak, BPJS, PLN, dan administrasi lainnya yang mencantumkan NIK

Kebutuhan dokumen dalam pengurusan administrasi tidak dapat diproses karena saling berkaitan atau bahkan bergantung untuk setiap pengurusan apapun tidak lepas dari membutuhkan identitas yang bersangkutan hasilnya kerugian didapat oleh pihak yang bersangkutan tidak dapat menjalankan proses apapun yang terkait dengan identitas.

c. Pengurusan identitas hanya dapat dilakukan di Pusat Pemerintahan

Apabila penduduk yang tinggal di daerah yang terpencil pengurusan di Pemerintah Daerah sulit dilakukan apalagi di Pemerintah Pusat tentu membutuhkan biaya transportasi karena NIK hanya dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Pusat

d. Tidak terbitnya dokumen identitas (KTP, SIM, paspor dan dokumen identitas lainnya).

Dokumen identitas hanya akan terbit dengan mencantumkan NIK karena untuk mempermudah akses segala urusan pelayanan yang hanya perlu menginput NIK tersebut juga sebagai keabsahan seseorang yang memiliki identitas tak luput dari ketentuan aturan yang berlaku. Apabila tidak terbit dokumen identitas seseorang tersebut akibatnya berdasarkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poin-poin diatas. Setiap orang memiliki kebutuhan hidup dalam berbagai bidang seperti, ekonomi, sosial, budaya, dan infrasturktur yang memerlukan identitas di dalamnya agar interaksi yang diinginkan berjalan dengan semestinya juga terwujudnya kesejahteraan hidup namun apabila identitas tersebut tidak terdeteksi atau tidak ada bahkan maka keinginan tersebut tidak akan terwujud.

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, NIK ganda merupakan persoalan yang rumit diatasi berdampak kepada penduduk itu sendiri yang memiliki NIK ganda juga berdampak terhadap pemerintah yang membuat kebijakan berimbas kepada kepuasan pelayan penduduk. Di Indonesia temukan 1,6 juta NIK ganda disebabkan berbagai macam sebab khususnya daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan prosedur administrasi apabila ditemukannya NIK ganda maka prosedur pembukaan dan pengaktifan data ganda :

- a. Membuat surat pernyataan (bagi yang merasa tidak memiliki kependudukan ganda) bermaterai Rp6.000, mengetahui RT&RW, Lurah, Camat dimana blanko surat pernyataan telah disiapkan di kantor kecamatan.
- b. Atas dasar surat pernyataan tersebut pada poin 1 dan KK yang bersangkutan, operator dispenduk melakukan pengecekan dan verifikasi data dengan Departemen Dalam Negeri .
- c. Apabila dari hasil verifikasi data, ditemukan 2 NIK di daerah yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan 2 pilihan untuk memilih salah satu NIK yang akan diaktifkan kembali dengan membuat surat

pernyataan permohonan untuk penghapusan salah satu NIK yang tidak dikehendaki yang mana surat pernyataan tersebut akan kami sampaikan ke Dispendukcapil daerah asal yang bersangkutan

Kecamatan Mandau tercatat sebagai penduduk terbanyak di Kabupaten Bengkalis dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan karena wilayahnya merupakan kawasan industri sehingga banyak pendatang luar daerah berdatangan bekerja disana sehingga meningkat. Dengan mengikuti pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mandau kebutuhan kepentingan masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi juga meningkat tercatat beberapa tahun terakhir yang mendapati NIK ganda juga meningkat disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penduduk yang memiliki NIK ganda sering terbengkalai dalam kepengurusan administrasi pelayanan publik seperti pengurusan BPJS, prosedur yang mencantumkan NIK tidak terdeteksi menjadi hambatan bagi warga yang ingin melakukan pengobatan, sementara penyakit yang diderita cukup parah juga membutuhkan waktu yang singkat namun dibutuhkan informasi identitas agar proses pengobatan berjalan sesuai dengan prosedur. Warga yang resah akan hal ini juga tidak bisa berbuat banyak karena sistem dan prosedur diatur oleh pemerintah diharuskan mengikutinya, tidak hanya kasus ini juga terdapat kasus lain yaitu ; penarikan rekening BANK, pembayaran pajak, pembayaran listrik dan banyak kasus lainnya membuat warga terlantar dalam urusan administrasi. Hal ini tidak hanya merugikan penduduk juga instansi yang terkait.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut jumlah penduduk yang telah terdaftar memiliki NIK serta yang memiliki NIK ganda di Kecamatan Mandau dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Tahun	Masyarakat Memiliki NIK	NIK Ganda
1	2013	259.286	47
2	2014	270.822	60
3	2015	281.953	88
4	2016	290.851	109
5	2017	129.915	212

Sumber : UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa bertambahnya penduduk di Kecamatan Mandau dalam lima tahun terakhir namun ditahun 2017 penduduk mengalami penurunan dikarenakan faktor penyebabnya seperti perekonomian penduduk, hal ini tidak mempengaruhi yang mendapati NIK ganda disebabkan penurun penduduk yang berpindah daerah yang menjadi penyebab terjadinya NIK ganda. Sesuai penyebabnya perpindahan domisili penduduk meningkatkan data ganda oleh desakan kebutuhan penduduk yang melakukan perpindahan domisili,, masyarakat yang menetap di Kecamatan Mandau mengalami tindasan data karena penduduk pendatang maupun keluar yang proses pengurusan administrasi perpindahannya belum diselesaikan, oleh karenanya pelaksana administrasi kependudukan yang ada di Kecamatan Mandau yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran dalam menindaklanjuti dan menanggapi aspirasi masyarakat serta memberi jalan keluar kepada masyarakat dalam masalah ini agar permasalahan yang ada dapat diatasi serta mencapai kesejahteraan penduduk. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk menambah wawasan penulis juga untuk memenuhi tugas skripsi prodi Administrasi Negara yaitu dengan judul **“Peran Dinas UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mengatasi NIK Ganda Di Kecamatan Mandau”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau dalam Mengatasi NIK ganda?
- 1.2.2 Apakah Hambatan UPTD Kependudukan dan Sipil Kecamatan Sipil Kecamatan Mandau dalam Menyelesaikan permasalahan NIK Ganda?



### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau dalam Mengatasi NIK ganda.
- 1.3.2 Mengetahui Hambatan UPTD Kependudukan dan Sipil Kecamatan Sipil Kecamatan Mandau dalam Menyelesaikan NIK Ganda.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Memberikan bahan masukan kepada pemerintah Mandau dalam mengatasi terdapatnya NIK ganda juga mencegah terjadinya NIK ganda tersebut.
- 1.4.2 Memberikan manfaat kepada penduduk yang mendapati NIK ganda serta mengembangkan cakrawala berfikir penulis dan menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 1.4.3 Masyarakat yang membutuhkan identitas untuk pengurusan dokumen tidak lagi bermasalah dalam penerbitan identitas dokumen seperti KTP, paspor, SIM dan dokumen identitas lainnya

### 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah :

**BAB I** : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : Landasan Teori**

Isi dari bab ini terdiri dari uraian landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran hipotesis.

**BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini berisikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis data.

**BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kecamatan Mandau dan terbentuknya UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan Peran Dinas UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mengatasi NIK Ganda pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan Saran